

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bojonegoro

Nisa Safaatin¹, Ertien Rining Nawangsari^{2*}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

*Email korespondensi: ertien.riningnawangsari@yahoo.com

Abstrak: *The Electronic Based Government System (SPBE) has been implemented in Bojonegoro Regency. In its implementation, there are several problems, namely the SPBE index which is still not optimal, lack of IT knowledge in human resources, and infrastructure which is still uneven. The aim of this research is to determine the strategy of the Bojonegoro Regency Communication and Information Service in implementing SPBE in Bojonegoro Regency. The focus of this research uses SOAR analysis by paying attention to 4 factors, namely Strength, Opportunities, Aspiration, and Results. This research was conducted in March 2023. The research methods used were structured interviews with several informants, observation by observing research objects, and documentation by searching for information in the form of notes, reports and news where the data obtained was then analyzed using SOAR analysis. The research results show that there are 4 strategies, namely the SA strategy, SR strategy, OA strategy, and OR strategy. The SA strategy that can be implemented is to improve the quality of human resources by providing training and technical guidance so that the implementation of SPBE can be carried out optimally. The SR strategy that can be implemented is by adding and strengthening infrastructure that can support the implementation of SPBE better. An OA strategy that can be implemented is by conducting regular training and technical guidance with more targets. The OR strategy that can be carried out is by making improvements to things that are still not optimal.*

Key Words: *Strategy, Electronic Based Government System , SOAR Analysis*

Abstrak: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diterapkan di Kabupaten Bojonegoro. Dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan yakni indeks SPBE yang masih kurang maksimal, kurangnya pengetahuan IT pada sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang masih belum merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini menggunakan analisis SOAR dengan memperhatikan 4 faktor yakni *Strength, Opportunities, Aspiration, dan Result*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023. Metode penelitian yang digunakan yakni wawancara terstruktur kepada beberapa informan, observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, dan dokumentasi dengan mencari informasi berupa catatan, laporan, maupun berita dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis SOAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 strategi yaitu strategi SA, strategi SR, strategi OA, dan strategi OR. Strategi SA yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan bimbingan sehingga penerapan SPBE dapat dilakukan secara optimal. Strategi SR yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penambahan dan penguatan sarana prasarana yang dapat mendukung terimplementasikannya SPBE dengan lebih baik lagi. Strategi OA yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin dengan target yang lebih banyak. Strategi OR yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan perbaikan pada hal-hal yang masih belum optimal.

Kata Kunci: *Strategi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Analisis SOAR*

PENDAHULUAN

Smart City atau yang biasa disebut kota pintar merupakan konsep sebuah kota yang menggunakan kemajuan teknologi informasi guna melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada mulai dari permasalahan dalam pemerintahan, infrastruktur hingga bencana. Konsep ini menekankan pada penggunaan TIK dan data dalam pemberian pelayanan secara efisien kepada warganya (Awaludin, 2019). TIK memiliki peran penting diantaranya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan yang berdampak pada layanan publik yang lebih baik (Arief, 2021). Pengembangan dan pemanfaatan dari TIK dalam mengolah, meningkatkan dan menghubungkan serta mengendalikan

berbagai sumber daya yang terdapat pada kota bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan layanan pemerintah sehingga dapat mengurangi dan menekan biaya, waktu serta tenaga. Penggunaan konsep tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dengan cepat dan tepat (Rahmadanita et al., 2019,).

Smart Government yang merupakan salah satu dimensi *Smart City* Menurut Rahmatullah (2021) merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penggunaan teknologi digital dalam tiap-tiap urusan pemerintahan termasuk dalam hal pemberian layanan publik kepada masyarakat. *Smart Government* atau yang dapat disebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut Awaludin (2019), perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dengan penerapan SPBE. Tujuan diterapkannya SPBE di Indonesia adalah mewujudkan tata kelola pemerintah menjadi lebih baik, jujur, bersih dan adil, meminimalisir korupsi, meningkatkan transparansi pemerintah kepada publik, menghemat waktu, mengefisienkan biaya, serta memberikan kenyamanan kepada pengguna karena segala hal dapat dilakukan secara digital (Arief, 2021).

Perkembangan *E-Government* di Indonesia telah mengalami kemajuan. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan *ranking* dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Melihat data dari survei yang dilakukan oleh PBB terlihat bahwa Indonesia menempati *ranking* 116 pada tahun 2016, kemudian naik pada *ranking* 107 pada tahun 2018, kemudian menempati *ranking* 88 pada tahun 2020, dan terakhir pada tahun 2022 Indonesia berhasil naik pada posisi *ranking* 77. Hal menunjukkan adanya peningkatan kualitas *E Government* di Indonesia.

SPBE telah diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu daerah yang telah menerapkan SPBE yakni Kabupaten Bojonegoro. Penerapan SPBE ini merupakan salah satu bagian dari *Smart City* yang merupakan salah satu dari 17 program prioritas Kabupaten Bojonegoro. Upaya peningkatan implementasi SPBE dilakukan dengan melakukan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui kekurangan serta melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang masih kurang maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh KEMENPAN&RB tahun 2021, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan instansi yang paling banyak memiliki indeks SPBE berada dibawah target indeks SPBE nasional, dimana terdapat 23 instansi yang memiliki indeks dibawah 2,6. Kota dan kabupaten yang memiliki indeks SPBE dibawah target tersebut mendapatkan kategori cukup sehingga masih terdapat *gap* atau kesenjangan karena belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Salah satu pemerintah daerah yang masih belum dapat memenuhi target yakni Kabupaten Bojonegoro yang mendapatkan indeks 2.45 dari target sebesar 2.6 yang artinya masih terdapat kesenjangan sebesar 0.15.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Target	Realisasi
2019	3.05	2.97
2020	3.41	3.20
2021	2.45	2.45
2022	2.74	2,65
2023	3.20	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojoengoro, 2022

Indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 dan 2020 telah memenuhi target dari KEMENPAN&RB yakni berada diatas 2,6, namun indeks tersebut masih belum memenuhi target

capaian indeks yang telah ditetapkan pada rencana strategis Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten Bojonegoro. Nilai indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro telah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebesar 2.97 kemudian meningkat menjadi 3.20 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 target SPBE Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi target yang ditetapkan oleh KEMENPAN&RB yakni 2,6 sedangkan indeks SPBE yang didapatkan oleh Kabupaten Bojonegoro yakni 2,45. Pada tahun 2022 indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro telah berada diatas target KEMENPAN&RB namun masih berada dibawah target yang telah ditetapkan Kabupaten Bojonegoro.

Secara spesifik permasalahan terkait SPBE di Kabupaten Bojonegoro yakni adalah terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dibidang IT. Menurut (Nawang Sari & Sari, 2019), sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peran yang sangat vital dalam proses pengimplementasian kebijakan. Oleh karena itu, suatu organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang baik akan lebih mudah mencapai tujuan organisasinya karena dianggap kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan lain yang terjadi terkait penyelenggaraan SPBE oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro diantaranya bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya, masih banyak kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, masih adanya *blankspot area* di beberapa wilayah Kabupaten Bojonegoro, pada akhir Tahun 2021 tercatat sebanyak 11 desa *blankspot area*, dan pada masa pandemic Covid-19 dilakukan pengurangan jumlah peserta pada kegiatan rapat dan bimtek.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muka (2020) menjelaskan bahwa permasalahan terkait SPBE yakni belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu, SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal, jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat yang belum optimal, keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis terkait TI. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ningsih (2024) juga menjelaskan bahwa permasalahan dalam penerapan SPBE yakni regulasi terkait SPBE yang masih belum memadai, belum adanya tim evaluator, serta permasalahan terkait integrasi data. Secara garis besar beberapa penelitian terdahulu terkait strategi dalam penerapan SPBE dianalisis menggunakan analisis SWOT, sementara dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis SOAR sebagai pisau analisis untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan. Menurut Stavros (2013), SOAR ialah penggunaan kekuatan dan peluang yang telah ada atau dimiliki suatu organisasi untuk menghasilkan aspirasi dan hasil. Analisis SOAR memiliki beberapa indikator yaitu *Strength* (kekuatan), *Opportunities* (peluang), *Aspirations* (aspirasi) dan *Results* (hasil). Kerangka kerja dalam analisis SOAR memiliki fokus pada perumusan serta pelaksanaan strategi yang bersifat positif dengan menggambarkan kekuatan, membangun kreativitas dalam bentuk peluang, mendorong *stakeholder* untuk berbagi aspirasi dan menentukan sebuah ukuran atau hasil yang berarti, sehingga dapat ditemukan strategi pengembangan yang tepat. Dengan ini, analisis SOAR berasal dari perkembangan analisis SWOT yang dianggap memunculkan perasaan negatif dan kemudian dikembangkan menjadi analisis SOAR dengan menawarkan strategi yang memiliki pengaruh positif dengan mempertimbangkan hal-hal positif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan adanya SOAR yaitu untuk menilai ukuran kapasitas individu dalam memikirkan strategi dengan berfokus pada empat indikator yang berfungsi bagi orientasi masa depan organisasi. Dan analisis SOAR menunjukkan peningkatan yang cukup besar sebagai kerangka kerja untuk pemikiran dan perencanaan strategis

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka diperlukan adanya sebuah strategi yang tepat untuk memaksimalkan penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Dari penjabaran latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan serta mendeskripsikan terkait Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE. Menurut Abdussamad (2021:79) metode penelitian kualitatif didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan temuan fakta lapangan tersebut, data kemudian diolah menjadi teori ataupun hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari informan, dokumen terkait serta catatan lapangan dari peneliti dan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, laporan, arsip dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan yakni wawancara dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan penelitian, observasi dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan dokumentasi dengan cara mencari data yang relevan dari catatan, buku, laporan, berita dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung ataupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan dalam periode tertentu. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis SOAR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian terkait temuan-temuan serta hasil penelitian di lapangan, peneliti akan menguraikan analisa data sesuai dengan rencana penelitian tentang Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bojonegoro. Guna mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan analisis SOAR menurut Stavros (2013) dengan melakukan analisis pada 4 faktor strategis diantaranya Kekuatan (*Strengths*), Peluang (*Opportunities*), Aspirasi (*Aspiration*) dan Hasil (*Result*).

Strengths (S) berfokus pada kekuatan dan kemampuan terbesar yang dimiliki, baik berupa aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kekuatan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kemajuan organisasi di masa yang akan datang (Stavros & Cole, 2013). Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE yakni adanya komitmen pimpinan dalam penerapan SPBE. Penerapan SPBE tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan serta komitmen dari pemerintah. Dukungan tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat hingga daerah (Mohi & Botutihe, 2020). Kekuatan lain yang dimiliki yakni telah dimilikinya dasar hukum yang kuat yang mengatur secara spesifik SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kendala dalam penerapan SPBE umumnya disebabkan karena kurang kuatnya dasar hukum atau regulasi yang ada sehingga implementasinya belum dapat dijalankan secara jelas dan tepat (Musaad, 2020). Selain itu, aspek sumber daya manusia juga memegang peran penting dalam penerapan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, namun tetap perlu dilakukan pengembangan kemampuan IT secara berkelanjutan. Kabupaten Bojonegoro juga telah memiliki berbagai aplikasi layanan publik yang diharapkan dapat mendorong terselenggaranya SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Kekuatan-kekuatan tersebut harus dimaksimalkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan penerapan SPBE.

Opportunities (O) berfokus pada lingkungan eksternal yang harus dianalisis agar lebih mudah menentukan dan memahami kesempatan yang menjadi peluang sebuah organisasi agar mengetahui apa

yang harus dilakukan dan memanfaatkannya dengan baik, sehingga dapat diperoleh peluang dengan cepat dan tepat. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan SPBE yakni adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat yang akan memberikan kemudahan dalam penerapan pemerintahan elektronik serta adanya dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE. selain itu yang menjadi peluang lain yakni adanya evaluasi SPBE yang dilakukan setiap tahun yang dapat menjadi pedoman terkait apa saja yang kurang dan perlu dilakukan perbaikan untuk tahun-tahun selanjutnya. Selain itu peluang lain yang dimiliki yakni adanya kerjasama dengan pihak eksternal serta adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang SPBE.

Aspirations (A) berfokus pada visi, misi, dan harapan yang ingin dicapai suatu organisasi guna membentuk kepercayaan diri terhadap produk, pasar, dan hal apapun hingga mampu bersaing dengan organisasi yang lain. Aspirasi (*Aspiration*) atau harapan yang dimiliki dalam penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro yakni terus meningkatnya indeks SPBE setiap tahunnya yang diketahui berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan setiap tahun. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga berharap dapat memenuhi target indeks SPBE yang telah ditentukan dalam rencana strategis. Selain berupaya meningkatkan indeks SPBE, harapan lain yakni meningkatkan implementasi SPBE oleh seluruh OPD di kabupaten Bojonegoro. Harapan tersebut tentunya akan dapat tercapai jika Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga berharap dapat melakukan bimbingan teknis dan pelatihan secara rutin dengan jumlah peserta lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Results (R) berfokus pada hasil yang ingin dicapai organisasi dalam perencanaan strategis untuk mengetahui pencapaian yang telah diraih dari tujuan yang diinginkan dan disepakati bersama. Dengan hal ini, organisasi akan merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila terdapat sebuah pengakuan (*recognition*) dan *reward* yang menarik. Hasil (*Result*) merupakan hasil yang diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE. Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa hasil yang telah didapatkan yakni meningkatnya indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya. Peningkatan indeks SPBE tersebut merupakan target yang ingin dipenuhi. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga berharap semua OPD juga mengimplementasikan SPBE dengan maksimal untuk memudahkan pekerjaan dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan.

Tabel 1. Matriks SOAR

Internal	<p>Strengths(S) Kekuatan internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam penerapan SPBE 2. Telah dimilikinya dasar hukum yang jelas yang mengatur tentang SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 3. Sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai, tetapi masih perlu terus ditingkatkan 4. Adanya banyak aplikasi yang dapat mendorong diterapkannya SPBE. 	<p>Opportunities (O) Peluang eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam penerapan SPBE 2. Dilakukannya evaluasi SPBE setiap tahunnya yang mendorong perubahan kearah yang lebih baik. 3. Adanya Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong implementasi SPBE secara optimal 4. Sarana dan prasarana penunjang SPBE sudah cukup memadai
Eksternal		

<p>Aspiration (A) Factor hasil eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspirasi terkait penerapan SPBE dapat disampaikan saat dilakukannya bimbingan teknis dan pelatihan 2. Perlu ditingkatkannya jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro <p>Diperlukan adanya penambahan sarana prasarana pendukung</p>	<p>Strategi SA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta bimbingan teknis dalam penerapan SPBE 2. Menyusun arsitektur SPBE di kabupaten Bojonegoro untuk memperjelas dasar hukum yang telah dimiliki. Perbaikan dari aplikasi aplikasi yang ada sehingga dapat lebih mudah dalam penggunaannya. 	<p>Strategi OA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan penerapan SPBE. 2. Melakukan penambahan dan penguatan sarana dan prasarana yang ada.
<p>Result (R) Faktor hasil eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peningkatan indeks SPBE setiap tahunnya. 2. Banyaknya penghargaan yang didapat terkait SPBE 3. Implementasi SPBE di Kabupaten Bojonegoro yang semakin baik didapatkannya penghargaan-penghargaan terkait SPBE. 	<p>Strategi SR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan bimtek dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, 2. Memperbaiki kualitas aplikasi yang ada untuk meningkatkan implementasi SPBE yang pada akhirnya dapat meningkatkan indeks SPBE sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 	<p>Strategi OR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana agar implementasi SPBE di kabupaten Bojonegoro. 2. Alokasi anggaran yang baik sehingga dapat dilakukan secara optimal. 3. Melakukan perbaikan pada hal-hal yang kurang berdasarkan evaluasi SPBE sehingga dapat meningkatkan indeks SPBE pada tahun tahun selanjutnya.

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas telah terbentuk matriks SOAR yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan SPBE diantaranya sebagai berikut:

Strategi SA (Strengths-Aspirations)

Strategi SA adalah strategi yang dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro secara maksimal dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan aspirasi atau harapan yang diinginkan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Aspirasi dapat dijadikan sebagai motivasi atau dorongan guna memaksimalkan kekuatan yang dimiliki sehingga terwujud harapan-harapan serta target di masa depan dalam hal penerapan SPBE. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi di lapangan, dapat diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE yakni adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam penerapan SPBE. Dengan adanya komitmen yang kuat, pihak pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta pihak Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk menyusun dasar hukum terkait SPBE yang dapat dijadikan kekuatan dalam penerapan SPBE. Selain itu, kekuatan lain yang dimiliki yakni adanya sumber daya manusia yang sudah cukup memadai dimana SDM yang ada sudah cukup memahami IT serta telah dimilikinya aplikasi-aplikasi layanan publik yang dapat meningkatkan implementasi dari SPBE di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki maka dapat disimpulkan bahwa strategi SA yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bojonegoro adalah dengan terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta bimbingan teknis dalam penerapan SPBE. SDM yang unggul dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam penerapan SPBE. Menurut

(Awaludin, 2019) kendala yang dihadapi terkait masalah SDM yakni masih rendahnya pemahaman pegawai terkait SPBE, latar belakang pendidikan yang beragam, serta keterbatasan kompetensi di bidang TIK. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM untuk mendorong implementasi SPBE agar lebih optimal. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan penyusunan peta arsitektur SPBE di Kabupaten Bojonegoro untuk memperjelas dasar hukum yang telah dimiliki. Untuk mencapai harapan adanya peningkatan implementasi SPBE di Kabupaten Bojonegoro maka perlu dilakukan perbaikan dari aplikasi-aplikasi yang ada sehingga dapat lebih mudah dalam penggunaannya baik bagi pegawai di instansi pemerintah maupun baik masyarakat. Aplikasi aplikasi yang ada juga harus ditingkatkan keamanannya demi mewujudkan penerapan SPBE yang optimal. Setiap organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menggunakan aplikasi ataupun website untuk menyediakan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat (Nasrullah, 2018). Penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat menghasilkan kualitas layanan publik yang lebih baik untuk menunjang kemudahan yang diberikan dalam segala aspek, sehingga tujuan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang pintar dapat sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang serba cepat (Rahmatullah, 2021)

Strategi SR (*Strengths-Result*)

Strategi SR adalah strategi yang dirumuskan dengan melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini strategi SR merupakan hasil rencana strategis berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan terkait dengan penerapan SPBE. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, diketahui kekuatan yang dimiliki yakni adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan kualitas sumber daya manusia yang sudah cukup baik. selain itu Kabupaten Bojonegoro telah memiliki dasar hukum yang jelas terkait penerapan SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kekuatan lain yang dimiliki yakni telah ada berbagai aplikasi yang dimiliki untuk mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian dari Hidayat (2022) menunjukkan bahwa implementasi E-government di kabupaten Bojonegoro jika dilihat berdasarkan standar (*World Bank*) masih dalam tahapan interaksi atau dapat dikatakan belum maksimal, untuk layanan e- government berbasis website pada kabupaten Bojonegoro sudah terlaksana cukup baik (Hidayat et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi SR yang dapat diterapkan sebagai rencana strategis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE yakni melakukan bimtek dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. SDM akan membawa pengaruh besar dalam proses implementasi kebijakan karena SDM yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan suatu kebijakan pemerintahan (Erni, 2019). Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika harus terus berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman agar menunjang terselenggaranya penerapan SPBE secara optimal. Selain itu, strategi lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yakni memperbaiki kualitas aplikasi yang ada untuk meningkatkan implementasi SPBE yang pada akhirnya dapat meningkatkan indeks SPBE sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Strategi OA (*Opportunities-Aspirations*)

Strategi OA adalah strategi yang dirumuskan dengan melakukan pemanfaatan secara maksimal seluruh peluang (*Opportunities*) yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mewujudkan harapan-

harapan atau aspirasi yang ada yang diinginkan oleh suatu organisasi. Maka dalam hal ini strategi OA dapat dilakukan dengan memaksimalkan seluruh peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk mencapai harapan terkait penerapan SPBE di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka telah diketahui bahwa peluang yang dimiliki yakni adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat yang mendorong adanya peningkatan sarana prasarana pendukung. Selain itu, dilakukannya evaluasi SPBE setiap tahunnya juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan karena dengan adanya penelaian SPBE maka Dinas komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten dapat melakukan perbaikan untuk kedepannya.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi OA (*Opportunities Aspiration*) yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan penerapan SPBE. selain itu strategi lain yang harus dilakukan yakni melakukan penambahan dan penguatan sarana dan prasarana yang ada.

Strategi OR (*Opportunities-Results*)

Strategi OR adalah strategi yang dirumuskan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara maksimal untuk mencapai hasil yang terukur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini strategi OR merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai hasil dan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa peluang-peluang yang dimiliki yakni adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat yang mendorong adanya peningkatan sarana prasarana yang tersedia dalam penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu adanya dukungan dari pihak pemerintah kabupaten juga dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan SPBE. Adanya evaluasi SPBE yang dilakukan setiap tahunnya juga mendorong perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian dimana telah diketahui peluang dan hasil yang diinginkan, maka strategi OR yang dapat diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana agar implementasi SPBE di Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih baik lagi. Peningkatan sarana dan prasarana tentunya juga harus diimbangi dengan alokasi anggaran yang baik sehingga dapat dilakukan secara optimal. Selain itu strategi lain yang dapat diterapkan adalah melakukan perbaikan pada hal-hal yang kurang berdasarkan evaluasi SPBE sehingga dapat meningkatkan indeks SPBE pada tahun tahun selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan analisis SOAR maka terdapat 4 strategi yang dapat diterapkan. Strategi SA yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan bimtek sehingga penerapan SPBE dapat dilakukan secara optimal. Strategi SR yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yakni dengan melakukan penambahan dan penguatan sarana prasarana yang dapat mendukung terimplementasikannya SPBE dengan lebih baik lagi. Strategi OA yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yakni dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin dengan target yang lebih banyak.

Strategi OR yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yakni dengan meningkatkan indeks SPBE dengan cara melakukan perbaikan pada hal hal yang masih kurang optimal pada tahun sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang optimal di tahun selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penambahan sarana dan prasarana, melakukan bimbingan teknis secara rutin, dan meningkatkan sosialisasi terkait penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Erni. (2019). *Program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram 2019*. 7(Dd), 2019.
- Hidayat, T., Wijayanti, S., Amrozi, Y., Informasi, S., Informatika, T., Islam, U., Walisongo, N., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). *Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro*. 4, 14–26. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1116>
- Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 115. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.115-124.2020>
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. G. D. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 253–276. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i3.142>
- Musaad, Y. H. (2020). Analisis Kebijakan Penerapan E Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(1), 1–12. <http://clic.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Nadila, S. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Nasrullah. (2018). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Nawang Sari, E. R., & Sari, W. K. (2019). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 86–95. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i2.12>
- Ningsih, R. Y. (2024). *Peran dan Potensi Implementasi Audit TI dalam Transformasi Digital Berkelanjutan pada Sektor Publik di Indonesia*. 1(1).
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81–106. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>

Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Ijd-Demos*, 3(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87>

Stavros, J. M., & Cole, M. L. (2013). SOARing towards positive transformation and change. *The ABAC ODI Visions Action Outcome*, 1(1), 10–34.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.